

Pelatihan Komunikasi Krisis sebagai Upaya Mitigasi Bencana Ekologis pada Masyarakat Pesisir Pulau Pasaran

ABSTRACT

Coastal communities are among the most vulnerable groups to ecological disasters caused by climate change, including tidal flooding, abrasion, and extreme weather events. One of the challenges faced by coastal communities is the limited capacity for crisis communication and disaster information management. This community service program aimed to strengthen crisis communication competencies among members of Disaster Preparedness Groups (KSB) and Tourism Awareness Groups (Pokdarwis) in Pulau Pasaran, Bandar Lampung. The program employed a Participatory Rural Appraisal (PRA) approach through training sessions, focus group discussions, and the development of a community-based crisis communication standard operating procedure (SOP). Evaluation was conducted using pre-test and post-test instruments to measure participants' knowledge improvement. The results indicate increased understanding of disaster mitigation, crisis communication principles, information verification, and emergency coordination mechanisms. The program also produced educational media in the form of a disaster mitigation poster and a crisis communication SOP. These outputs are expected to support community preparedness and strengthen local resilience in facing ecological disasters in coastal areas.

Keyword: crisis communication, ecological disaster, disaster mitigation, coastal community, community empowerment

ABSTRAK

Masyarakat pesisir merupakan kelompok yang rentan terhadap berbagai bencana ekologis akibat perubahan iklim, seperti banjir rob, abrasi, dan cuaca ekstrem. Salah satu tantangan yang dihadapi masyarakat pesisir adalah masih terbatasnya kapasitas komunikasi krisis dan pengelolaan informasi kebencanaan. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan kompetensi komunikasi krisis anggota Kelompok Siaga Bencana (KSB) dan Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) di Pulau Pasaran, Bandar Lampung. Program dilaksanakan menggunakan pendekatan Participatory Rural Appraisal (PRA) melalui pelatihan, diskusi kelompok terarah, serta penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) komunikasi krisis berbasis komunitas. Evaluasi dilakukan menggunakan instrumen pre-test dan post-test untuk mengukur peningkatan pemahaman peserta. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman peserta mengenai mitigasi bencana, prinsip komunikasi krisis, verifikasi informasi, serta mekanisme koordinasi darurat. Selain itu, kegiatan menghasilkan media edukasi berupa poster mitigasi bencana ekologis dan SOP komunikasi krisis yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat secara berkelanjutan. Luaran tersebut

diharapkan mampu meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat dan memperkuat ketangguhan komunitas pesisir dalam menghadapi bencana ekologis.

Kata Kunci: komunikasi krisis, mitigasi bencana, bencana ekologis, pemberdayaan masyarakat

PENDAHULUAN

Perubahan iklim telah meningkatkan frekuensi dan intensitas berbagai bencana ekologis yang mengancam wilayah pesisir. Kawasan pesisir tidak hanya menghadapi ancaman abrasi dan kenaikan muka air laut, tetapi juga berbagai dampak sosial yang muncul akibat terbatasnya akses informasi dan rendahnya kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana. Dalam konteks ini, komunikasi krisis menjadi salah satu instrumen penting dalam mendukung upaya mitigasi bencana dan pengurangan risiko bencana berbasis masyarakat. Komunikasi krisis merupakan komponen penting dalam manajemen bencana karena berfungsi mengurangi ketidakpastian informasi, membangun kepercayaan publik, dan memfasilitasi tindakan perlindungan diri selama situasi darurat (Coombs, 2021).

Wilayah pesisir merupakan salah satu kawasan yang paling rentan terhadap dampak perubahan iklim, terutama akibat kenaikan muka air laut, banjir rob, dan abrasi yang berpotensi mengganggu kehidupan sosial ekonomi masyarakat (Rahman & Rahman, 2020). Pulau Pasaran di Kota Bandar Lampung merupakan salah satu wilayah pesisir yang memiliki kerentanan terhadap bencana banjir rob. Kondisi geografis yang berdekatan dengan laut menyebabkan masyarakat secara periodik mengalami genangan air laut yang berdampak pada aktivitas ekonomi dan sosial. Di sisi lain, Pulau Pasaran juga merupakan kawasan wisata dan sentra pengolahan ikan yang melibatkan berbagai kelompok masyarakat seperti Kelompok Siaga Bencana (KSB) dan Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis).

Hasil identifikasi awal menunjukkan bahwa masyarakat belum memiliki sistem komunikasi krisis yang terstruktur. Penyebaran informasi kebencanaan masih dilakukan secara informal dan belum didukung oleh prosedur operasional yang jelas. Selain itu, kemampuan masyarakat dalam melakukan verifikasi

informasi dan menangkal hoaks kebencanaan masih relatif rendah. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan kepanikan serta menghambat proses koordinasi saat terjadi keadaan darurat. Kemampuan masyarakat dalam memverifikasi informasi menjadi faktor penting dalam mengurangi penyebaran hoaks selama bencana. Rendahnya literasi digital dapat menyebabkan kepanikan dan kesalahan pengambilan keputusan (Vraga & Bode, 2020).

Menurut Coombs (2020), komunikasi krisis merupakan proses pengelolaan informasi yang dilakukan untuk mengurangi ketidakpastian dan membantu publik mengambil keputusan yang tepat saat menghadapi situasi krisis. Sementara itu, pendekatan Community-Based Disaster Risk Reduction menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat sebagai aktor utama dalam pengurangan risiko bencana.

Berdasarkan kondisi tersebut, kegiatan pengabdian ini bertujuan meningkatkan kapasitas komunikasi krisis masyarakat pesisir melalui pelatihan mitigasi bencana ekologis, penyusunan SOP komunikasi krisis, dan pengembangan media edukasi kebencanaan.

METODE PENELITIAN

Kegiatan pengabdian dilaksanakan di Pulau Pasaran, Kota Bandar Lampung dengan melibatkan 30 peserta yang terdiri atas anggota Kelompok Siaga Bencana (KSB) dan Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis). Pelaksanaan kegiatan menggunakan pendekatan Participatory Rural Appraisal (PRA) yang menempatkan masyarakat sebagai subjek utama dalam proses pembelajaran dan pengambilan keputusan.

Tahapan kegiatan meliputi:

1. Identifikasi kebutuhan mitra melalui observasi dan diskusi awal.
2. Pelaksanaan pre-test untuk mengukur tingkat pengetahuan awal peserta.
3. Penyampaian materi komunikasi krisis dan mitigasi bencana ekologis.

4. Focus Group Discussion (FGD) penyusunan SOP komunikasi krisis.
5. Penyusunan media edukasi berupa poster mitigasi bencana.
6. Pelaksanaan post-test sebagai evaluasi hasil pelatihan.

Instrumen evaluasi menggunakan kuesioner pre-test dan post-test yang terdiri dari 10 pertanyaan terkait mitigasi bencana, komunikasi krisis, verifikasi informasi, peran KSB dan Pokdarwis, serta konsep pembangunan berkelanjutan. Data dianalisis secara deskriptif dengan membandingkan hasil pre-test dan post-test peserta untuk melihat perubahan tingkat pemahaman setelah pelatihan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan Pelatihan Komunikasi Krisis

Pelatihan dilaksanakan secara partisipatif dengan mengombinasikan metode ceramah, diskusi kelompok, simulasi kasus, dan praktik penyusunan pesan komunikasi darurat. Materi yang diberikan meliputi pengenalan bencana ekologis pesisir, prinsip komunikasi krisis, mitigasi hoaks kebencanaan, serta mekanisme koordinasi informasi saat keadaan darurat. Upaya penyampaian materi ini juga untuk meningkatkan literasi digital masyarakat. Perkembangan media digital memberikan peluang sekaligus tantangan dalam penyebaran informasi kebencanaan. Informasi yang tidak terverifikasi dapat berkembang menjadi hoaks dan memperburuk kondisi krisis. Oleh karena itu, literasi digital menjadi kompetensi penting bagi masyarakat dalam menghadapi bencana (UNESCO, 2021). Pelatihan ini dilaksanakan di Balai Pertemuan Warga Kalaju dengan jumlah peserta sebanyak 30 orang. Kegiatan juga dihadiri oleh Ketua RT Pulau Pasaran beserta pemuda setempat.



Gambar 1 : Foto Bersama Saat Sesi Pembukaan Pelatihan

Pelatihan berbasis partisipatif terbukti mampu meningkatkan kapasitas masyarakat dalam memahami risiko bencana dan meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi kondisi darurat (Scolobig, Prior, Schröter, Jörin, & Patt, 2015). Peserta menunjukkan antusiasme tinggi terutama pada sesi simulasi komunikasi krisis yang menampilkan berbagai skenario banjir rob yang sering terjadi di wilayah Pulau Pasaran.



Gambar 2: Penyampaian Materi Komunikasi Krisis



Gambar 3: Simulasi Komunikasi Krisis Kasus Bencana

Peningkatan Pemahaman Peserta

Evaluasi program dilakukan melalui pemberian kuesioner *pre-test* dan *post-test* kepada seluruh peserta pelatihan. Instrumen terdiri atas 10 pertanyaan yang mencakup lima indikator utama. Tujuan evaluasi ini adalah untuk

mengidentifikasi perubahan tingkat pengetahuan dan pemahaman peserta setelah memperoleh materi pelatihan. Selain itu, hasil evaluasi digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan transfer pengetahuan yang diberikan selama kegiatan berlangsung dan sebagai bahan perbaikan program pengabdian pada masyarakat pada kegiatan selanjutnya. Hasil perbandingan pre-test dan post-test digunakan sebagai indikator keberhasilan kegiatan dalam meningkatkan kapasitas masyarakat pesisir terhadap kesiapsiagaan dan mitigasi bencana ekologis. Berdasarkan hasil evaluasi, terjadi peningkatan pemahaman peserta setelah mengikuti pelatihan.

Peningkatan terlihat pada aspek:

- Pemahaman mitigasi bencana.
- Fungsi komunikasi krisis.
- Verifikasi informasi kebencanaan.
- Peran KSB dan Pokdarwis.
- Konsep *Blue and Green Development*.

Table 1
Hasil Pre-Test dan Post-Test Peserta

Indikator	Pre-Test (%)	Post-Test (%)
Mitigasi Bencana	66,6%	100%
Komunikasi Krisis	50%	83,3%
Verifikasi Informasi	83,3%	100%
Peran KSB dan Pokdarwis	50%	100%
Blue and Green Development	33,3%	83,3%

Source: Hasil Olah Data Penulis (2026)

Hasil ini menunjukkan bahwa pelatihan berkontribusi terhadap peningkatan literasi kebencanaan dan kemampuan komunikasi peserta. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa pelatihan komunikasi krisis dan mitigasi bencana ekologis memberikan dampak positif terhadap peningkatan pengetahuan

peserta. Rata-rata tingkat pemahaman peserta meningkat dari 56,67% pada saat pre-test menjadi 93,33% pada saat post-test.

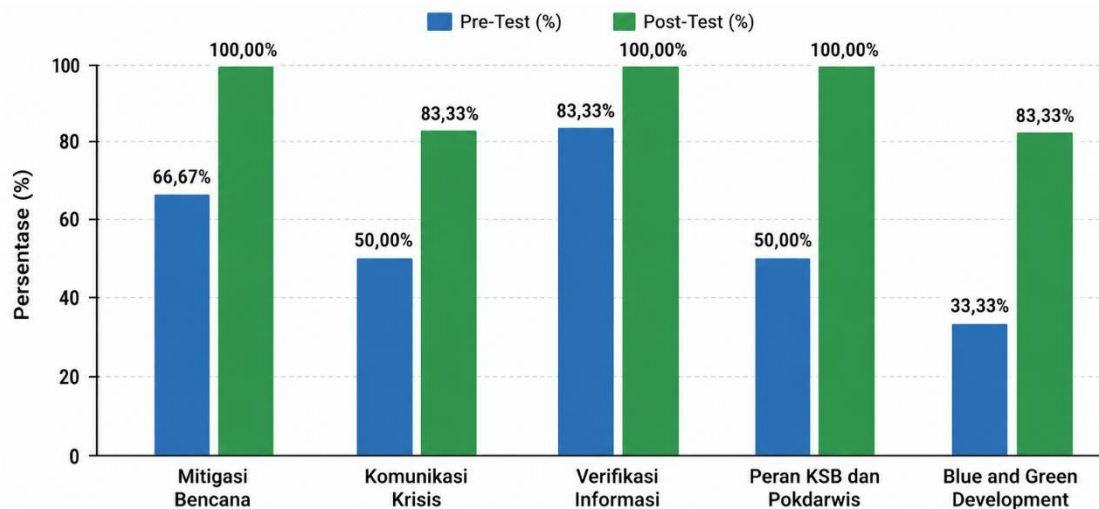


Diagram 1: Peningkatan Pengetahuan Peserta

Peningkatan tertinggi terjadi pada indikator *Peran KSB dan Pokdarwis* serta *Blue and Green Development*, yang masing-masing meningkat sebesar 50 poin persentase. Sementara itu, indikator *Verifikasi Informasi* menunjukkan nilai awal yang relatif tinggi (83,33%) dan meningkat menjadi 100% setelah pelatihan. Temuan ini menunjukkan bahwa materi yang diberikan berhasil meningkatkan pemahaman peserta mengenai komunikasi krisis, mitigasi bencana, serta pentingnya kolaborasi komunitas dalam menghadapi ancaman bencana ekologis di wilayah pesisir.

Temuan ini sejalan dengan penelitian Hidayati (2021) yang menyatakan bahwa pelatihan berbasis komunitas mampu meningkatkan kapasitas masyarakat dalam pengurangan risiko bencana melalui penguatan pengetahuan, keterampilan, dan kesiapsiagaan. Selain itu, hasil kegiatan juga mendukung pandangan Yuliarti dan Pratiwi (2023) bahwa komunikasi risiko yang efektif berperan penting dalam meningkatkan kesadaran masyarakat pesisir terhadap ancaman bencana dan tindakan mitigasi yang perlu dilakukan.

Penyusunan SOP Komunikasi Krisis

Salah satu luaran utama kegiatan adalah penyusunan SOP Komunikasi Krisis Mitigasi Bencana Ekologis di Pulau Pasaran. SOP memuat prinsip komunikasi krisis yang cepat, akurat, terkoordinasi, transparan, dan empatik. Selain itu, SOP mengatur alur komunikasi mulai dari deteksi dini, penyampaian peringatan awal, koordinasi tindakan, hingga tindak lanjut pascabencana. Kehadiran SOP ini memberikan pedoman yang jelas bagi masyarakat dalam menghadapi situasi darurat.



Gambar 2: Poster SOP Komunikasi Krisis

SOP tersebut menekankan lima prinsip utama komunikasi krisis, yaitu cepat, akurat, terkoordinasi, transparan, dan empatik. Informasi kebencanaan harus disampaikan sesegera mungkin menggunakan sumber yang valid, mengikuti jalur koordinasi yang jelas, serta mengutamakan keselamatan masyarakat. Selain itu, SOP mengatur alur komunikasi mulai dari tahap deteksi dini, peringatan awal, konfirmasi kondisi lapangan, koordinasi tindakan, penyebaran informasi, hingga tindak lanjut pascabencana. Alur ini dirancang untuk memastikan setiap informasi yang diterima masyarakat telah melalui

proses verifikasi sehingga dapat mengurangi penyebaran hoaks dan kesalahan informasi.

SOP juga menjelaskan pembagian peran dan tanggung jawab antar pemangku kepentingan. Pokdarwis berperan dalam pemantauan lingkungan pesisir dan penyebaran informasi awal, RT bertugas meneruskan informasi kepada warga serta memantau kondisi lingkungan, sedangkan lurah berfungsi sebagai koordinator utama yang berhubungan langsung dengan BPBD dan instansi terkait. Untuk mendukung efektivitas penyampaian informasi, SOP memanfaatkan berbagai media komunikasi seperti grup WhatsApp, pengeras suara, radio komunitas, papan informasi, komunikasi door to door, dan telepon langsung.

Keberadaan SOP ini diharapkan dapat meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat, memperkuat koordinasi antaraktor lokal, serta menciptakan sistem komunikasi krisis yang lebih efektif dalam menghadapi ancaman banjir rob dan bencana ekologis lainnya di kawasan pesisir Pulau Pasaran. Selain menjadi panduan operasional saat terjadi bencana, SOP ini juga berfungsi sebagai media edukasi yang mendukung upaya pengurangan risiko bencana berbasis masyarakat secara berkelanjutan.

Pengembangan Media Edukasi

Luaran lainnya berupa poster mitigasi bencana banjir rob yang berisi informasi mengenai risiko bencana, langkah mitigasi, tindakan saat bencana, serta nomor kontak darurat. Media ini dirancang menggunakan pendekatan visual yang mudah dipahami masyarakat sehingga dapat digunakan oleh berbagai kelompok masyarakat, mulai dari nelayan, pelaku wisata, hingga warga umum serta dapat meningkatkan efektivitas komunikasi risiko kebencanaan.

Poster diawali dengan penjelasan mengenai pengertian banjir rob, yaitu peristiwa naiknya permukaan air laut yang menyebabkan genangan di wilayah pesisir, terutama saat terjadi pasang tinggi yang dipengaruhi oleh kondisi cuaca, angin kencang, dan perubahan iklim. Informasi ini penting untuk memberikan

pemahaman dasar kepada masyarakat mengenai karakteristik ancaman yang sering terjadi di Pulau Pasaran.

Selain itu poster menjelaskan berbagai faktor risiko yang menyebabkan masyarakat Pulau Pasaran rentan terhadap banjir rob, seperti lokasi permukiman yang berada di dataran rendah dekat laut, tingginya pasang air laut, perubahan iklim, serta potensi kerusakan lingkungan pesisir. Dampak yang ditimbulkan tidak hanya berupa genangan dan kerusakan infrastruktur, tetapi juga pencemaran lingkungan, gangguan aktivitas ekonomi, dan penurunan kualitas hidup masyarakat.



Gambar 3 : Poster Mitigasi Bencana Ekologis Banjir Rob Pulau Pasaran

Untuk meningkatkan kapasitas masyarakat dalam menghadapi bencana, poster memuat tujuan mitigasi bencana, yaitu mengurangi risiko dan dampak banjir rob, melindungi keselamatan jiwa dan harta benda, menjaga kelestarian lingkungan pesisir, serta meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat. Tujuan

tersebut menjadi landasan bagi berbagai upaya pengurangan risiko bencana yang dapat dilakukan secara mandiri maupun bersama-sama oleh warga.

Bagian utama poster berisi enam langkah mitigasi banjir rob, yaitu memantau informasi cuaca dan peringatan dini, memperkuat lingkungan pesisir melalui pelestarian mangrove, memperbaiki dan meningkatkan infrastruktur, menjaga kebersihan drainase dan saluran air, menyiapkan perlengkapan darurat, serta memperkuat kebersamaan dan gotong royong masyarakat. Langkah-langkah tersebut disusun berdasarkan prinsip mitigasi berbasis komunitas yang menekankan partisipasi aktif masyarakat dalam mengurangi risiko bencana.

Poster juga memberikan panduan mengenai tindakan yang harus dilakukan saat banjir rob terjadi, seperti mengutamakan keselamatan keluarga, memindahkan barang berharga ke tempat yang lebih tinggi, menghindari genangan yang berarus deras, mematikan aliran listrik jika air mulai masuk ke rumah, serta mengikuti arahan petugas dan melakukan evakuasi apabila diperlukan. Informasi ini diharapkan dapat membantu masyarakat mengambil keputusan yang tepat saat menghadapi kondisi darurat.

Sebagai pelengkap poster mencantumkan berbagai nomor layanan darurat yang dapat dihubungi masyarakat ketika terjadi bencana, seperti BPBD, pemadam kebakaran, dan layanan ambulans. Dengan adanya informasi tersebut, masyarakat memiliki akses yang lebih cepat terhadap bantuan dan layanan penanggulangan bencana.

Secara keseluruhan, poster mitigasi bencana ini berfungsi sebagai media komunikasi risiko yang mendukung peningkatan literasi kebencanaan masyarakat pesisir. Keberadaan poster diharapkan mampu memperkuat budaya kesiapsiagaan, meningkatkan kesadaran kolektif terhadap pentingnya pelestarian lingkungan pesisir, serta mendorong terbentuknya masyarakat Pulau Pasaran yang lebih tangguh dalam menghadapi ancaman banjir rob dan bencana ekologis lainnya.

KESIMPULAN

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat berupa Pelatihan Komunikasi Krisis dan Mitigasi Bencana Ekologis bagi Kelompok Siaga Bencana (KSB) dan Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) di Pulau Pasaran telah berhasil dilaksanakan sesuai dengan tujuan yang ditetapkan. Program ini mampu meningkatkan kapasitas peserta dalam memahami konsep mitigasi bencana ekologis, komunikasi krisis, verifikasi informasi, peran kelembagaan lokal dalam penanggulangan bencana, serta pentingnya pembangunan berkelanjutan berbasis *Blue and Green Development*.

Hasil evaluasi melalui instrumen pre-test dan post-test menunjukkan adanya peningkatan pemahaman peserta dari rata-rata 56,67% menjadi 93,33%, yang mengindikasikan bahwa metode pelatihan, diskusi partisipatif, dan simulasi yang diterapkan efektif dalam meningkatkan literasi kebencanaan masyarakat pesisir. Peningkatan pengetahuan ini diharapkan mampu mendukung terbentuknya perilaku yang lebih responsif dan adaptif terhadap ancaman banjir rob serta bencana ekologis lainnya.

Selain peningkatan kapasitas peserta, kegiatan ini juga menghasilkan dua luaran utama berupa Poster Mitigasi Bencana Ekologis dan Banjir Rob serta SOP Komunikasi Krisis Mitigasi Bencana Ekologis di Pulau Pasaran. Kedua produk tersebut berfungsi sebagai media edukasi dan pedoman operasional yang dapat digunakan secara berkelanjutan oleh masyarakat dan pemangku kepentingan lokal dalam meningkatkan kesiapsiagaan, koordinasi, dan efektivitas penyebaran informasi saat terjadi kondisi darurat.

Melalui kegiatan ini terbangun sinergi yang lebih baik antara Pokdarwis, KSB, aparatur kelurahan, dan masyarakat dalam upaya pengurangan risiko bencana berbasis komunitas. Dengan demikian, program pengabdian tidak hanya memberikan manfaat berupa peningkatan pengetahuan, tetapi juga memperkuat ketangguhan masyarakat pesisir Pulau Pasaran dalam menghadapi dampak perubahan iklim dan bencana ekologis secara berkelanjutan.

Untuk menjaga keberlanjutan hasil kegiatan, diperlukan pelatihan lanjutan dan simulasi kebencanaan secara berkala guna memperkuat

keterampilan komunikasi krisis masyarakat. Selain itu, SOP komunikasi krisis yang telah disusun perlu diimplementasikan secara konsisten dan didukung oleh pemerintah setempat melalui regulasi atau kebijakan komunitas. Pengembangan media edukasi berbasis digital juga perlu dilakukan agar informasi mitigasi bencana dapat menjangkau masyarakat yang lebih luas dan mendukung terwujudnya masyarakat pesisir yang tangguh, adaptif, dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Aldrich, D. P., & Meyer, M. A. (2015). Social capital and community resilience. *American Behavioral Scientist*, 59(2), 254–269.
- Amri, M. R., Yulianti, G., Yunus, R., Wiguna, S., Adi, A. W., Ichwana, A. N., & Randongkir, R. E. (2016). Risiko bencana Indonesia. *Jurnal Dialog Penanggulangan Bencana*, 7(2), 1–9.
- Coombs, W. T. (2023). *Ongoing crisis communication: Planning, managing, and responding* (6th ed.). Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
- Hidayati, D. (2021). Penguatan kapasitas masyarakat dalam pengurangan risiko bencana berbasis komunitas. *Jurnal Kependudukan Indonesia*, 16(1), 35–48.
- Houston, J. B., Hawthorne, J., Perreault, M. F., Park, E. H., Goldstein Hode, M., Halliwell, M. R., ... Griffith, S. A. (2015). Social media and disasters: A functional framework for social media use in disaster planning, response, and research. *Disasters*, 39(1), 1–22.
- IPCC. (2023). *Climate Change 2023: Synthesis Report*. Geneva: Intergovernmental Panel on Climate Change.
- Shaw, R. (2019). *Disaster risk reduction and community resilience*. Tokyo: Springer.
- Suryani, I., & Kurniawan, B. (2022). Literasi digital masyarakat dalam menghadapi disinformasi kebencanaan. *Jurnal Komunikasi Ikatan Sarjana Komunikasi Indonesia*, 7(1), 45–58.
- UNESCO. (2021). *Media and Information Literacy Curriculum for Educators and Learners*. Paris: UNESCO Publishing.
- Twigg, J. (2015). *Disaster risk reduction*. London: Overseas Development Institute.
- United Nations Office for Disaster Risk Reduction. (2023). *Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015–2030: Progress Report*. Geneva: UNDRR.

- Norris, F. H., Stevens, S. P., Pfefferbaum, B., Wyche, K. F., & Pfefferbaum, R. L. (2008). Community resilience as a metaphor, theory, set of capacities, and strategy for disaster readiness. *American Journal of Community Psychology*, 41(1–2), 127–150.
- Mileti, D. S., & Sorensen, J. H. (2018). *Communication of emergency public warnings*. New York: Routledge.
- Mulyasari, F., & Shaw, R. (2021). Community-based disaster risk reduction in Indonesia: Progress and challenges. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 25(2), 155–170.
- Yuliarti, M., & Pratiwi, A. (2023). Strategi komunikasi risiko bencana pada masyarakat pesisir di Indonesia. *Jurnal ASPIKOM*, 8(1), 120–134.